

## *Development and Dissemination of the Public Governance Canvas in Pagar Alam City*

### **Pengembang dan Diseminasi Public Governance Canvas di Kota Pagar Alam**

**Rosy Armaini<sup>1</sup>, Riana Mayasari<sup>2\*</sup>, Kartika Rachma Sari<sup>3</sup>, Jovan Febriantoko<sup>4</sup>, Okky Savira<sup>5</sup>, M. Syarif Hidayatullah<sup>6</sup>, Muhammad Rizky<sup>7</sup>, Nabila Cantik Islamy<sup>8</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya,

E-mail: [rosyarmaini@polsri.ac.id](mailto:rosyarmaini@polsri.ac.id)<sup>1</sup>, [riana.mayasari@polsri.ac.id](mailto:riana.mayasari@polsri.ac.id)<sup>2\*</sup>, [kartikasyahrul@polsri.ac.id](mailto:kartikasyahrul@polsri.ac.id)<sup>3</sup>, [jovan.febriantoko@polsri.ac.id](mailto:jovan.febriantoko@polsri.ac.id)<sup>4</sup>, [okky.savira@polsri.ac.id](mailto:okky.savira@polsri.ac.id)<sup>5</sup>, [m.syarif940gmail.com](mailto:m.syarif940gmail.com)<sup>6</sup>, [muhhammadriizky4@gmail.com](mailto:muhhammadriizky4@gmail.com)<sup>7</sup>, [nabila.islamy@gmail.com](mailto:nabila.islamy@gmail.com)<sup>8</sup>

#### **Abstract**

This community service program addresses challenges faced by the Government of Pagar Alam City in strengthening regional financial governance, particularly the effectiveness of internal control systems and the quality of financial reporting. Key issues include limited understanding of good governance principles among civil servants, weak integration across organizational units, and the absence of practical managerial tools. The program was implemented over six months through an initial assessment, dissemination of the PGC concept, application-based training and simulations, technical assistance, and evaluation. The target beneficiaries were civil servants of the Pagar Alam City, with an expected minimum improvement of 80% in participants' understanding and capacity. Program outputs include a PGC pocket guide, financial governance mapping, and an internal control action plan to ensure sustainability. The program is expected to strengthen internal control systems, enhance accountability, and generate best practices that can be replicated by other organizational units within the Pagar Alam City.

**Keywords:** *PGC, good governance, internal control system, financial reporting.*

#### **Abstrak**

*Program pengabdian Masyarakat ini dilatarbelakangi oleh tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Pagaralam dalam meningkatkan tata Kelola keuangan daerah, khususnya efektivitas system pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan. Permasalahan utama meliputi rendahnya pemahaman aparatur terhadap prinsip good governance, lemahnya integritasi antarunit kerja, dan belum optimalnya alat bantu manajerial. Metode pelaksanaan dilakukan selama enam bulan melalui survei awal, sosialisasi konsep PGC, pelatihan aplikasi dan simulasi, pendampingan teknis, serta evaluasi hasil kegiatan. Target mitra adalah Aparatur Pemerintah Kota Pagar Alam dengan capaian kegiatan peningkatan pemahaman dan kapasitas aparatur minimal 80% dengan luran berupa buku saku PGC, peta tata Kelola keuangan, dan tersusunnya rencana aksi pengendalian internal sebagai luaran keberlanjutan. Dampak manfaat program ini adalah memperkuat system pengadilan internal, meningkatkan akuntabilitas, serta menciptakan praktik baik yang dapat direplikasi oleh OPD lain id lingkungan Pemerintah Kota Pagaralam.*

**Kata kunci:** *PGC, tata kelola yang baik, sistem pengendalian internal, pelaporan keuangan.*

## **1. PENDAHULUAN**

Kota Pagar Alam merupakan daerah otonom di Provinsi Sumatera Selatan yang terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sebagai pemerintah daerah, Kota Pagar Alam wajib menyusun laporan keuangan berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, evaluasi laporan keuangan dalam beberapa tahun terakhir masih menunjukkan kelemahan pada efektivitas sistem pengendalian internal (Ariyanti et al., 2022). Selain itu, ketepatan penyajian laporan keuangan, yang berdampak pada kualitas informasi keuangan dan akuntabilitas publik (Mayasari, 2022). Kelemahan tersebut umumnya bersumber dari keterbatasan pemahaman aparatur mengenai integrasi peran antarunit kerja, lemahnya dokumentasi proses, serta belum optimalnya penerapan prinsip good

governance dalam pengelolaan keuangan publik (Febriantoko & Rotama, 2018)(Oktavian & Astuti, 2020). Reformasi birokrasi saat ini, pemerintah daerah dituntut memiliki model tata kelola yang praktis dan aplikatif. Salah satu pendekatan yang relevan adalah Public Governance Canvas (PGC), yaitu alat bantu visual untuk memetakan proses tata kelola, mengidentifikasi risiko, serta merancang sistem pengendalian internal secara terintegrasi (Byrne & Braha, 2012).

Perumusan Masalah yang dapat di tarik dari permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Pagar Alam meliputi: (1) lemahnya efektivitas sistem pengendalian internal, (2) keterbatasan ASN dalam memetakan proses dan risiko pengelolaan keuangan, serta (3) belum tersedianya alat bantu visual terpadu untuk evaluasi dan pengendalian risiko lintas OPD. Kondisi ini meningkatkan risiko kesalahan penyajian laporan keuangan dan berdampak pada opini audit BPK.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini yaitu untuk mengembangkan dan mendiseminasikan Model *Public Governance Canvas (PGC)* guna meningkatkan kapasitas ASN dalam pengendalian internal berbasis risiko, memperbaiki pemetaan proses pengelolaan keuangan, serta mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam.

Gambaran kondisi dan potensi wilayah Kota Pagar Alam secara fisik dan administratif, Kota Pagar Alam memiliki struktur kelembagaan yang relatif kompak dengan SKPD strategis seperti Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai penggerak utama tata kelola keuangan. Berdasarkan aspek sosial dan kelembagaan, ASN memiliki potensi yang memadai, namun masih membutuhkan penguatan kapasitas teknis dan manajerial. Observasi awal dan diskusi dengan BKD menunjukkan bahwa sebagian ASN masih kesulitan memetakan proses pengendalian internal secara sistematis dan belum memiliki model visual terpadu, sehingga proses evaluasi dan pengendalian risiko berjalan kurang optimal.

Upaya yang pernah dilakukan Pemerintah Kota Pagar Alam yaitu telah melakukan berbagai upaya perbaikan melalui tindak lanjut rekomendasi BPK, bimbingan teknis SAP, dan penerapan SPIP. Namun, upaya tersebut masih bersifat parsial dan belum didukung model praktis yang aplikatif (Febriantoko & Mayasari, 2022)(Febriantoko, 2024).

Analisis kebutuhan mitra menunjukkan perlunya model tata kelola yang sederhana, visual, dan terintegrasi untuk membantu ASN memetakan proses, mengidentifikasi risiko, serta mengevaluasi kinerja pelaporan keuangan. Berdasarkan diskusi awal dengan BKD, ditemukan bahwa keterbatasan alat bantu visual memperlambat proses evaluasi dan pengendalian risiko organisasi. Oleh karena itu, penerapan PGC diharapkan menjadi solusi untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Sulaiman et al., 2024)(Jundia et al., 2023)(Hakim et al., 2025).

## 2. Tahapan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan Pengabdian ini di awalai dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada pelaksanaan program sosialisasi dan pelatihan Model Public Governance Canvas (PGC) pada lingkungan Pemerintah Kota Pagaralam. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses implementasi PGC dalam penguatan sistem pengendalian internal dan peningkatan kualitas laporan keuangan.

### a. Jadwal Kegiatan dan Tempat Penelitian

Kegiatan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan pada bulan Juli-Desember 2025 di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Pagaralam, khususnya pada Badan Keuangan Daerah (BKD)

### b. Target Mitra Sasaran Kegiatan

Target kegiatan adalah aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di OPD strategis yang berperan dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan sistem pengendalian internal

### c. Alur Tahapan Kegiatan

Tabel 1. Tahapan dan *Timeline* Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Tahapan Kegiatan	<i>Timeline</i> (Bulan Ke-)					
	1	2	3	4	5	6
Koordinasi Awal	✓					
Survei Awal dan Persiapan Kegiatan	✓					
Penyusunan dan Finalisasi Modul Materi Pelatihan		✓				
Penyuluhan dan Sosialisasi Model PGC			✓			
Simulasi & Coaching PGC				✓		
Pendampingan Teknis dan Implementasi Awal					✓	
Evaluasi Output					✓	
Tindak Lanjut dan Pelaporan						✓

## d. Instrumen Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan dengan media Power Point dan Modul Pelatihan. Power point digunakan untuk menyampaikan materi sosialisasi secara umum, sedangkan modul pelatihan digunakan untuk menjelaskan teknik simulasi implementasi Public Governance Canvas (PGC).

## e. Proses Evaluasi dan Monitoring Kegiatan

Instrumen monitoring kegiatan yang digunakan meliputi: kuesioner *pre-test* dan *post-test*, panduan wawancara, catatan observasi, serta dokumentasi hasil pelatihan dan simulasi. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, serta dokumentasi kegiatan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program berlangsung selama 6 (enam) bulan dengan tahapan yang telah direncanakan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap pemahaman aparatur sipil negara (ASN) mengenai konsep dan implementasi PGC, khususnya dalam konteks penguatan sistem pengendalian internal dan pelaporan keuangan. Peserta pelatihan mampu memahami struktur tata kelola yang baik, mengenali risiko-risiko potensial dalam pengelolaan keuangan, serta menyusun rancangan rencana aksi penguatan laporan keuangan secara sistematis.

Selain peningkatan pemahaman konseptual, pelatihan ini juga berdampak pada peningkatan keterampilan teknis ASN dalam menggunakan alat bantu seperti governance mapping template dan simulasi pengendalian internal. Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu menyusun skema pengendalian internal dengan akurasi tinggi dan menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap proses pelaporan keuangan berbasis prinsip tata kelola yang baik.

**Tabel dan Gambar**

Tabel berikut menyajikan hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan indikator capaian.

Tabel 2. Tabel Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Indikator Capaian	Hasil
Peningkatan Pemahaman ASN	Peningkatan pemahaman minimal 80% dari hasil pre-test dan post-test
Luaran Program	Buku saku PGC, governance mapping, template canvas, dan draft rencana aksi
Kapasitas Manajerial	75% peserta mampu menyusun skema pengendalian internal dengan akurasi $\geq 80\%$
Replikasi Program	Sebagian besar OPD telah menghasilkan draft rencana aksi penguatan laporan keuangan

Penerapan Model PGC terbukti membantu aparatur dalam memahami struktur tata kelola keuangan publik secara visual dan sistematis. Dengan metode partisipatif dan simulasi, ASN dapat lebih mudah mengidentifikasi titik risiko dan mengembangkan langkah pengendalian yang sesuai dengan kondisi riil unit kerja.

Hasil ini sejalan dengan prinsip good public governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengendalian internal (Alqooti, 2020) (Febriani et al., 2025). Selain meningkatkan kapasitas individu ASN, penerapan PGC juga memberikan dasar penguatan kelembagaan melalui penyusunan dokumen pengendalian internal yang terstandar. Peningkatan literasi tata kelola ini diharapkan mendukung pencapaian opini audit yang lebih baik dari BPK serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Pagaralam (Rufaedah, 2020) (Hidayah et al., 2025).

Upaya dalam memperkuat analisis keberhasilan program PKM, maka dilakukan penilaian hasil pre test dan post test yang selanjutnya diolah dengan aplikasi SPSS. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pengetahuan aparatur Pemerintah Kota Pagaralam mengenai Public Governance Canvas (PGC).

Untuk memperkuat hasil analisis deskriptif tersebut, dilakukan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS melalui uji Paired Sample T-Test guna mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil pengolahan data disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Tabel Uji Paired Samples Statistics

Variabel	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
<i>Pre-Test</i>	29,67	15	8,55	2,21
<i>Post-Test</i>	93,00	15	6,76	1,75

Hasil uji deskriptif menunjukkan nilai rata-rata hasil *post-test* (93,00) jauh lebih tinggi dibanding *pre-test* (29,67). Maka kegiatan pelatihan memberikan peningkatan pengetahuan yang signifikan terhadap peserta.

Tabel 4. Tabel Uji Paired Samples Correlations

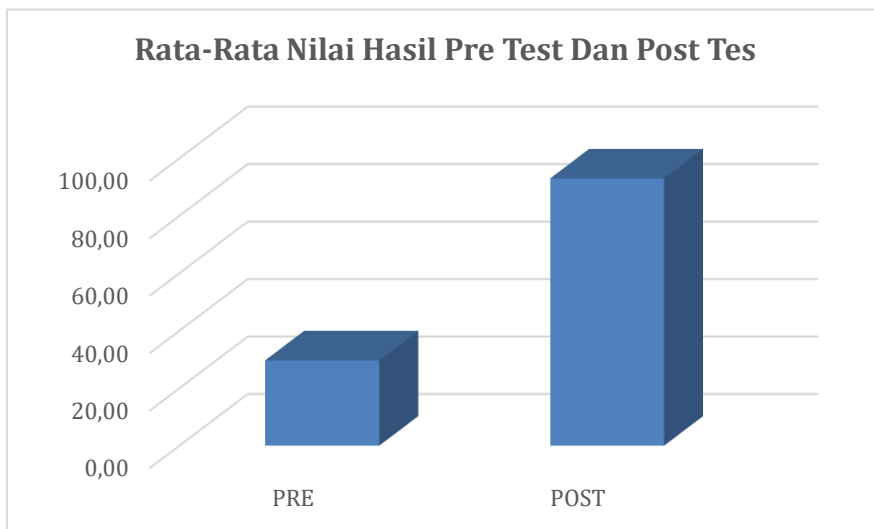
Pair	N	Correlations	Sig
<i>Pre-Post</i>	15	0,317	0,247

Nilai korelasi sebesar 0,317 menunjukkan hubungan lemah antara skor sebelum dan sesudah kegiatan, dengan tingkat signifikansi 0,247 (>0,05). Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara hasil *pre-test* dan *post-test*, namun hal ini tidak memengaruhi hasil uji beda utama.

Tabel 5. Tabel Uji Paired Samples Test

Variabel	Mean Difference	t	df	Sig. (2-tailed)
<i>Pre-Post</i>	-63,33	- 24,058	14	0,000

Hasil uji *Paired Samples T-Test* menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) = 0,000 < 0,05, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara nilai sebelum dan sesudah kegiatan. Dengan demikian, pelatihan *Public Governance Canvas (PGC)* secara statistik terbukti meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan.



Gambar 1. Grafik rata-rata nilai yang diuji pada awal dan akhir kegiatan pengabdian.

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan rata-rata tingkat pengetahuan petani setelah kegiatan dilakukan. Nilai rata-rata pre-test sebesar 29,67 meningkat secara signifikan menjadi 93,00 pada post-test. Peningkatan ini menggambarkan bahwa kegiatan pelatihan atau sosialisasi yang dilaksanakan berhasil meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta secara substansial. Hasil ini juga memperkuat temuan uji Paired Samples T-Test yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan petani.



Gambar 2. Zoom Meeting terkait Penerapan PGC di Sektor Pemerintah Daerah

<b>KONTEKS &amp; TANTANGAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketimpangan digital</li> <li>• Ketergantungan teknologi</li> </ul>	<b>AKTOR &amp; PEMANGKU KEPENTINGAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah</li> <li>• Akademisi</li> <li>• Sektor swasta</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>	<b>NILAI PUBLIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses IPTEK untuk semua</li> <li>• Inovasi inklusif</li> </ul>
<b>STRATEGI INTERVENSI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitalisasi layanan</li> <li>• Kolaborasi riset</li> </ul>	<b>TATA KELOLA &amp; INSTITUSI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi teknologi</li> <li>• Koordinasi antar lembaga</li> </ul>	<b>TAIA KELOLA &amp; INSTIFUSI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi teknologi</li> <li>• Koordinasi antar lembaga</li> </ul>
<b>DATA, TEKNOLOGI &amp; INOVASI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Big data, AI, IoT</li> <li>• Platform digital publik</li> </ul>		<b>EVALUASI &amp; PEMBELAJARAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator kinerja digital</li> <li>• Monitoring inovasi</li> </ul>

Gambar 3. Gambaran IPTEK Public Governance Canvas

No.	Elemen PGC	Makna/Aspek Utama	Pertanyaan yang Relevan	Pertanyaan
1	Nilai Publik	Pelayanan kepada publik, kesesuaian kebutuhan masyarakat	P1, P5, P10	P1: Apakah SK Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersedia di situs JDH atau situs resmi Pemda?
2	Partisipasi	Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan/kebijakan	P2, P3	P2: Apakah dokumen RPJMD dan RKPD dipublikasikan di situs Bappeda atau Pemda? P3: Apakah hasil Musrenbang tahunan tersedia dalam bentuk laporan atau berita resmi di situs Bappeda?
3	Transparansi	Keterbukaan informasi, akses terhadap dokumen dan kebijakan	P2, P4, P5, P8	P4: Apakah dokumen LAKIP OPD tersedia di situs Pemda atau e-SAKIP? P5: Apakah SOP Pelayanan Publik tersedia di situs OPD (misal: Disdukcapil, DPMP/TSPT)?
4	Akuntabilitas	Tanggung jawab pemerintah dalam pelaporan dan tindak lanjut	P4, P6, P9	P9: Apakah laporan evaluasi kinerja OPD tersedia dan dapat diakses masyarakat melalui situs e-SAKIP atau Pemda? P6: Apakah sistem SP4N-LAPOR! aktif dan tersedia statistik aduan dari Kota Pagar Alam di situs nasional?
5	Responsivitas	Kemampuan pemerintah merespons keluhan, kebutuhan masyarakat	P6, P10	P10: Apakah informasi layanan digital (e-Service, dashboard, aplikasi) tersedia dan aktif digunakan masyarakat?
6	Kapasitas dan Kompetensi	Kemampuan ASN dan organisasi dalam menjalankan fungsi dan inovasi	P11	P11: Apakah dokumen pelatihan/sertifikasi kompetensi ASN tersedia secara daring, atau dilaporkan melalui kanal e-Gov daerah?
7	Kolaborasi dan Sinergi	Kerja sama lintas sektor dan pemangku kepentingan	P7	P7: Apakah dokumen MoU/kerja sama lintas sektor dipublikasikan di situs Pemda atau Bagian Kerja Sama?
8	Keperimpinan Inovatif dan Etis	Keperimpinan yang mendorong perubahan positif dan beretika	P12	P12: Apakah inovasi kepemimpinan, etika birokrasi, atau penghargaan pemerintah daerah dipublikasikan di situs resmi atau kanal berita lokal?
9	Pembelajaran dan Adaptabilitas	Kemampuan belajar dari evaluasi dan beradaptasi terhadap perubahan	P8, P9	P8: Apakah kebijakan atau Perda terbaru dipublikasikan secara online melalui situs JDH?

Gambar 4. Hasil Pelatihan Instrumen PGC

Pada kegiatan *Zoom Meeting* tersebut dilakukan penjelasan konsep dasar Public Governance Concept (PGC) yang merupakan sebuah model untuk merancang sekaligus memperbaiki tata kelola publik. PGC berorientasi pada terciptanya sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dikarenakan penerapan PGC di tingkat pemerintah daerah sangat penting. Pemerintah daerah merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik. Melalui penerapan model PGC, pemerintah daerah diharapkan mampu memperbaiki kualitas kebijakan, memperkuat mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan Model Public Governance Canvas (PGC) pada Pemerintah Kota Pagaram telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui rangkaian kegiatan mulai dari sosialisasi, pelatihan, simulasi, hingga pendampingan teknis, ASN peserta kegiatan mengalami peningkatan pemahaman terhadap prinsip good governance, sistem pengendalian internal, serta penyusunan laporan keuangan berbasis akuntabilitas.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 80% peserta mengalami peningkatan pemahaman, 75% peserta mampu menerapkan teknik pengendalian internal melalui template canvas, dan seluruh OPD sasaran berhasil menyusun draft rencana aksi penguatan pelaporan keuangan. Luaran kegiatan berupa modul pelatihan, peta tata kelola keuangan, dan template canvas juga dapat menjadi alat bantu strategis bagi OPD dalam memperbaiki proses tata kelola keuangan.

Secara umum, penerapan Model PGC efektif dalam meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial ASN, memperkuat sistem pengendalian internal, dan mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Program ini sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Pagaram dan memperkuat posisi daerah dalam pencapaian opini audit yang lebih baik dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Sriwijaya melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) dalam skema Pengabdian Penugasan Inovasi Tahun 2025 yang telah memberikan dukungan pendanaan terhadap kegiatan pengabdian ini, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alqooti, A. A. (2020). Public governance in the public sector: literature review. *EuroMid Journal of Business and Tech-Innovation*, 14–25.
- Ariyanti, I., Mayasari, R., Jumeilah, F. S., & Astuti, I. I. (2022). *Motion Graphic untuk Peningkatan PAD Sektor Pariwisata Studi pada Kota Pagaram*.
- Byrne, B., & Braha, Y. (2012). *Creative motion graphic titling: Titling with motion graphics for film, video, and the web*. Routledge.
- Febriani, Z., Perdanakusuma, F. H., & Seventeen, W. L. (2025). Pengaruh Pengendalian Internal, Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Good Governance di Kantor PEMDA Kabupaten Bengkulu Selatan. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 1155–1162.
- Febriantoko, J. (2024). Unveiling Fiscal Integrity: The Transformative Impact of Accountability and Transparency on Local Government Financial Report Quality in Indonesia. *International Joint Conference/Seminar*, 1(3), 92–106.
- Febriantoko, J., & Mayasari, R. (2022). *Referensi Pemetaan Kewilayahan Berbasis SIG (untuk menunjang PAD Sektor Pariwisata Kota Pagaram* (1st ed.). UIN RADEN FATAH PRESS.
- Febriantoko, J., & Rotama, H. (2018). *Evaluasi Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Bidang Pariwisata di Indonesia*.
- Hakim, M. R., Zamani, I. S., Amanah, R., Zuhaja, I., & Lestari, A. T. (2025). The Implementation Of Zakat Utilization Model Canvas (ZUMC) As A Fundraising Strategy In Amil Zakat Institutions In Southeast Sulawesi. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 254–262.
- Hanafi, R., Munir, M., Suwatno, S., & Furqon, C. (2023). Identification of IT Governance and Management Objectives and Target Process Capability Level in Government Institution. *INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi*, 7(2), 290–308.
- Hidayah, A., Sopiyan, A. R., & Mayasari, R. (2025). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Dana Insentif Fiskal pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. *Economic Reviews Journal*,

4(2), 843–859.

- Jundia, H. S., Sarwono, A. E., & Astuti, D. S. P. (2023). Analisis Peningkatkan Kualitas Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Jawa Tengah. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 12(2), 259–267.
- Martins, H. F., Mota, J. P., & Marini, C. (2019). Business models in the public domain: the public governance canvas. *Cadernos EBAPE. BR*, 17, 49–67.
- Mayasari, R. (2022). Lemahnya Signifikansi Sistem Pengendalian Internal untuk Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1).
- Oktavian, D. N. D., & Astuti, P. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017-2018. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 5, 145–151.
- Rufaedah, Y. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Kabupaten Bandung Barat. *Sigma-Mu*, 12(2), 44–64.
- Sari, Y. L. (2025). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi SDM, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai ASN di Kantor Kecamatan Kota Metro*. IAIN Metro.
- Sitanggang, S. (2023). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) pada Kantor Bupati Samosir*.
- Sulaiman, S., Listiana, Y. D., & Trimawarni, A. (2024). Pelatihan Dan Pendampingan Penguatan Kapasitas Asn Dalam Penerapan Good Governance Di Kota Pontianak. *Aksime: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Akuntansi, Manajemen & Ekonomi*, 1(4), 8–17.
- Sumantri, I. (2022). Reorientasi reformasi birokrasi dan good governance dalam penyelenggaraan sektor publik di Indonesia. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(2), 63–72.
- Yasin, A. S. Y., Anwar, A., Sagena, U. W., & Masjaya, M. (2024). Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputersasi Akuntansi*, 17(2), 410–418.